

## **Pengembangan Konsep Dan Kebijakan Zero Pengangguran Lulusan di SMK ATM Majalengka**

**Mursidin**

Univesitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Correspondence: [mursidin@uinsgd.ac.id](mailto:mursidin@uinsgd.ac.id)

---

### **Abstract**

*Unemployment among vocational high school graduates remains a critical issue in Indonesia's human resource development, particularly in regional areas. This condition reflects a mismatch between graduate competencies and the needs of industry. This community service program aims to develop the concept and policy of zero unemployment for graduates at SMK ATM Majalengka through an institutional policy approach, strengthening industry partnerships, and optimizing the role of the Special Job Fair Unit. The implementation method was participatory, including needs analysis, policy formulation, implementation assistance, job readiness training, and program evaluation. The results indicate an improvement in graduate job readiness, the establishment of a zero-unemployment policy document, and an increased absorption of graduates into industry and entrepreneurship. This program also produced a model for an integrated and sustainable vocational school graduate management policy. This community service activity significantly contributes to reducing the unemployment rate among vocational school graduates and can be replicated in other vocational schools with similar characteristics.*

**Keyword:** Zero unemployment, education policy, vocational high school graduates

---

### **Abstrak**

Pengangguran lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) masih menjadi permasalahan serius dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, bahkan menpati jumlah terbesar, baik dikota maupun di daerah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengembangkan konsep dan kebijakan zero pengangguran lulusan di SMK ATM Majalengka melalui pendekatan kebijakan institusional, penguatan kemitraan industri, serta optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan secara partisipatif melalui tahapan perumusan kebijakan Sekolah untuk pembuatan pedoman operasioanl zero pengangguran, pendampingan implementasi, pelatihan kesiapan pendampingan siswa, serta evaluasi ketercapaian program. Hasil pengabdian menunjukkan adanya peningkatan kompetensi guru dalam berpartisipasi menyiapkan tersusunnya dokumen kebijakan zero pengangguran lulusan, serta meningkatnya tingkat serapan lulusan oleh dunia industri dan wirausaha mandiri. Program ini juga menghasilkan model kebijakan pengelolaan lulusan SMK yang terintegrasi dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka pengangguran lulusan SMK serta dapat direplikasi pada SMK lain dengan karakteristik serupa.

**Kata Kunci:** Zero pengangguran, kebijakan pendidikan, lulusan SMK



© 2025 The Authors. Published by Biha Cendekia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan vokasi memiliki posisi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia karena dirancang untuk menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi teknis, sikap profesional,

serta kesiapan memasuki dunia kerja (Muharam et al., 2025). Di Indonesia, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diproyeksikan sebagai tulang punggung penyedia tenaga kerja terampil yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa lulusan SMK justru menjadi penyumbang tertinggi angka pengangguran terbuka dibandingkan lulusan jenjang pendidikan lainnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan vokasi, khususnya pada aspek kebijakan penyiapan dan pengelolaan lulusan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK secara konsisten berada pada posisi tertinggi selama beberapa tahun terakhir, pada februari 2025 saja mencapai 8,00 persen (Rico, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa orientasi pendidikan vokasi yang seharusnya menekankan kesiapan kerja belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Berbagai kajian menyebutkan bahwa tingginya pengangguran lulusan SMK tidak semata-mata disebabkan oleh keterbatasan lapangan kerja, tetapi juga oleh ketidaksesuaian kompetensi, lemahnya soft skills, kurangnya jejaring industri, serta absennya kebijakan sekolah yang terintegrasi dalam mengelola lulusan pasca kelulusan.

Secara konseptual, permasalahan pengangguran lulusan SMK mencerminkan adanya *mismatch* antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja (Setiyana & Oktora, 2024). Dunia industri bergerak sangat dinamis, menuntut tenaga kerja yang tidak hanya menguasai keterampilan teknis, tetapi juga memiliki adaptabilitas, etos kerja, komunikasi, dan kemampuan belajar berkelanjutan. Sementara itu, banyak SMK masih berfokus pada penyelesaian kurikulum dan kelulusan akademik, tanpa diimbangi dengan kebijakan institusional yang menjamin kesinambungan proses pembinaan hingga lulusan benar-benar terserap di dunia kerja atau memiliki alternatif jalur pasca kelulusan.

Dalam konteks regional, Kabupaten Majalengka mengalami perkembangan ekonomi yang cukup signifikan seiring dengan hadirnya kawasan industri, pembangunan infrastruktur strategis, serta meningkatnya investasi. Kondisi ini membuka peluang besar bagi SMK untuk berperan sebagai pemasok tenaga kerja terampil. Namun, peluang tersebut tidak secara otomatis menjamin terserapnya lulusan SMK jika tidak diiringi oleh kebijakan sekolah yang sistematis dan berorientasi pada outcome lulusan. SMK ATM Majalengka sebagai salah satu lembaga pendidikan vokasi di wilayah ini menghadapi tantangan serupa, yaitu masih adanya lulusan yang belum terserap kerja atau belum memiliki jalur jelas pasca kelulusan.

Berdasarkan analisis situasi awal, permasalahan yang dihadapi SMK ATM Majalengka meliputi beberapa aspek utama. Pertama, belum tersusunnya kebijakan tertulis yang secara khusus mengatur pembinaan siswa dan pengelolaan lulusan pasca kelulusan secara terintegrasi. Kedua, kemitraan dengan dunia industri masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya berkelanjutan. Ketiga, peran Bursa Kerja Khusus (BKK) belum dioptimalkan sebagai pusat layanan karier dan penyaluran kerja lulusan. Keempat, kesiapan soft skills, mental kerja, dan orientasi karier siswa masih beragam dan belum dibangun secara sistematis sejak awal masa studi. Kondisi ini berdampak pada munculnya pengangguran jangka pendek lulusan SMK setelah kelulusan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan sekolah, kurikulum berbasis industri, kemitraan DUDI, serta sistem penyaluran lulusan yang jelas (Rojaki et al., 2021). Direktorat SMK menegaskan bahwa revitalisasi SMK harus mencakup penguatan *link and match*, pembinaan karier, serta pengelolaan lulusan secara berkelanjutan, bukan hanya pada aspek pembelajaran di kelas (Dewi, 2022). Pentingnya manajemen sumber daya manusia yang terencana, termasuk penyiapan lulusan sebagai bagian dari investasi jangka panjang institusi pendidikan. Sementara

itu, kinerja organisasi, termasuk sekolah, ditentukan oleh kejelasan tujuan, kebijakan, dan sistem evaluasi yang berorientasi pada hasil (Purwati et al., 2025).

Namun demikian, sebagian besar penelitian dan praktik baik yang ada masih berfokus pada peningkatan kompetensi teknis, pengembangan kurikulum, atau pelaksanaan praktik kerja industri. Masih terbatas kajian dan implementasi yang secara spesifik mengembangkan kebijakan institusional berbasis konsep zero pengangguran lulusan sebagai kerangka kerja strategis pengelolaan lulusan SMK. Padahal, kebijakan semacam ini berpotensi menjadi instrumen penting dalam menjamin bahwa setiap lulusan memiliki jalur yang jelas, baik bekerja di industri, berwirausaha, maupun melanjutkan pendidikan.

Konsep zero pengangguran lulusan dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai ketiadaan pengangguran secara absolut, melainkan sebagai upaya sistematis dan terencana agar tidak ada lulusan yang dibiarkan tanpa pendampingan dan arah pasca kelulusan. Konsep ini menempatkan sekolah sebagai institusi yang bertanggung jawab tidak hanya pada proses pembelajaran, tetapi juga pada outcome lulusan. Dengan demikian, keberhasilan sekolah diukur dari sejauh mana lulusan terserap, berdaya saing, dan memiliki kemandirian ekonomi.

Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pengembangan kebijakan institusional zero pengangguran lulusan yang disusun secara partisipatif, dituangkan dalam pedoman operasional dan SOP sekolah, serta diintegrasikan dengan pembinaan siswa sejak kelas X hingga kelas XII. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang bersifat insidental dan reaktif, model ini menekankan perencanaan jangka panjang, penguatan peran BKK, pemetaan minat dan potensi siswa, serta penguatan jejaring industri secara berkelanjutan. Model kebijakan ini diharapkan menjadi praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi oleh SMK lain dengan karakteristik serupa.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menjadi relevan dan strategis untuk menjawab permasalahan pengangguran lulusan SMK, khususnya di SMK ATM Majalengka. Pengembangan konsep dan kebijakan zero pengangguran lulusan diharapkan tidak hanya memberikan dampak praktis bagi mitra, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan pendidikan vokasi di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan pihak sekolah, guru, siswa, manajemen BKK, serta mitra industri (Zunaidi, 2024). Pendekatan ini dipilih agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan nyata mitra dan dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi:

1. Analisis Situasi dan Kebutuhan Mitra  
Analisis dilakukan melalui wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan telaah dokumen sekolah. Tahap ini bertujuan mengidentifikasi kondisi lulusan, tingkat serapan kerja, serta kebijakan yang telah ada.
2. Perumusan Konsep dan Kebijakan Zero Pengangguran  
Berdasarkan hasil analisis, tim pengabdian bersama pihak sekolah menyusun konsep dan draft kebijakan zero pengangguran lulusan yang mencakup mekanisme penelusuran lulusan, penyaluran kerja, dan pendampingan pasca kelulusan dengan produk pedoman Operasional Zero Pengangguran.
3. Pendampingan Implementasi  
Pendampingan dilakukan dalam bentuk pembentukan tim penyusunan SOP zero pengangguran, workshop, pelatihan teknik pendampingan pembinaa kegiaiatn siswa, pelatihan penguatan sinerga BKK, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pembinaan kegiatan siswa zero pengangguran dan SOP penyaluran lulusan.

4. Pelatihan Kesiapan Kerja  
Pelatihan difokuskan pada penguatan kemampuan guru dalam mendampingi kegiatan siswa untuk menguasai soft skills, etos kerja, komunikasi, dan wawasan dunia kerja sejak kelas 10 hingga kelas 12.
5. Evaluasi Ketercapaian Program  
Evaluasi dilakukan dengan mengukur tingkat ketercapaian tujuan melalui indikator produk SOP Zero pengangguran, pelatihan pendampingan kegiatan siswa bagi seluruh guru, pemetaan kebutuhan tingkat daya serap lulusan, dan keberfungsian kebijakan yang disusun.  
Adapun keberhasilan kegiatan diukur secara deskriptif dan kualitatif melalui perubahan sikap, kesiapan kerja, serta peningkatan serapan lulusan oleh industri dan wirausaha serta kuliah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi Awal Pengelolaan Lulusan SMK ATM Majalengka**

Hasil analisis awal menunjukkan bahwa pengelolaan lulusan di SMK ATM Majalengka sebelum pelaksanaan program pengabdian masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu kebijakan institusional yang utuh. Penanganan siswa dan lulusan lebih banyak bergantung pada inisiatif individu guru, wali kelas, atau pengelola Bursa Kerja Khusus (BKK), tanpa didukung oleh pedoman operasional tertulis yang mengikat seluruh warga sekolah. Akibatnya, proses pembinaan siswa, penyaluran kerja, dan pendampingan pasca kelulusan berjalan tidak seragam dan sulit dievaluasi secara sistematis.

Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus yang menunjukkan bahwa sebagian besar guru memahami pentingnya penyaluran lulusan, namun belum memiliki kerangka kerja yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam sistem zero pengangguran lulusan. Selain itu, data internal sekolah menunjukkan bahwa masih terdapat lulusan yang belum bekerja atau belum memiliki aktivitas produktif dalam kurun waktu 3–6 bulan setelah kelulusan.

Kondisi ini mencerminkan lemahnya kebijakan kelembagaan (*institutional policy gap*) dalam pendidikan vokasi. Sekolah belum sepenuhnya memosisikan pengelolaan lulusan sebagai bagian dari sistem manajemen sekolah, melainkan sebagai kegiatan tambahan. Padahal, berbagai literatur menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi sangat ditentukan oleh kesinambungan antara proses pembelajaran, pembinaan karier, dan outcome lulusan.

### **Capaian Pengabdian Masyarakat**

Namun pelaksanaan kegiatan pengabdian menghasilkan beberapa capaian utama, yaitu diantaranya:

#### **1. Perumusan dan Implementasi Kebijakan Zero Pengangguran Lulusan**

Hasil utama dari kegiatan pengabdian ini adalah tersusunnya dokumen kebijakan Zero Pengangguran Lulusan yang menjadi pedoman resmi SMK ATM Majalengka. Kebijakan ini dirumuskan secara partisipatif melalui pelibatan pimpinan sekolah, guru, pengelola BKK, dan mitra industri. Dokumen kebijakan mencakup prinsip dasar zero pengangguran, tujuan kebijakan, mekanisme pembinaan siswa, jalur pasca kelulusan, serta sistem monitoring dan evaluasi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat bekerjasama dengan pihak sekolah yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Tim Pengabdian Masyarakat Bersama Pihak Sekolah

Kebijakan zero pengangguran lulusan dirancang dengan pendekatan *student pathway* (Jackson et al., 2023), yaitu memastikan setiap siswa memiliki jalur yang jelas sejak awal masa studi, baik menuju dunia kerja, wirausaha, maupun pendidikan lanjutan. Pendekatan ini menggeser paradigma sekolah dari sekadar “meluluskan siswa” menjadi “mengantarkan lulusan menuju kemandirian”. Kegiatan ini salah satunya dilakukan dengan langkah pengarahan terhadap siswa, yang kegiatannya dapat terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Kegiatan pengarahan kegiatan pengabdian kepada siswa

Dari perspektif kebijakan pendidikan, temuan ini menunjukkan bahwa kejelasan regulasi internal sekolah berperan penting dalam mengarahkan perilaku organisasi (Sopwandin, 2023). Guru dan pengelola sekolah menjadi lebih terstruktur dalam menjalankan peran pembinaan siswa karena memiliki acuan kerja yang sama. Hal ini memperkuat pendapat bahwa kebijakan institusional merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan kinerja pendidikan vokasi.

## 2. Penguatan Peran Bursa Kerja Khusus (BKK)

Implementasi kebijakan zero pengangguran lulusan berdampak signifikan terhadap penguatan peran Bursa Kerja Khusus (BKK). Sebelum program, BKK lebih banyak berfungsi sebagai unit administratif penyaluran lowongan kerja. Setelah pendampingan, BKK bertransformasi menjadi pusat layanan karier sekolah yang aktif melakukan pemetaan lulusan, komunikasi dengan industri, serta pendampingan alumni.

Hasil pendampingan menunjukkan bahwa BKK mulai memiliki database lulusan yang lebih rapi, termasuk data minat kerja, kompetensi, dan status pasca kelulusan. Selain itu, jejaring

kemitraan dengan industri lokal dan regional mengalami peningkatan, baik dari sisi jumlah mitra maupun intensitas komunikasi. Salah satu contoh kegiatan pembimbingan dalam kegiatan pengabdian ini terlihat pada gambar berikut.



Gambar 3. Kegiatan Pembimbingan oleh Tim PKM

Secara konseptual, penguatan BKK ini menegaskan bahwa lembaga pendukung di sekolah vokasi harus diberdayakan secara optimal agar mampu menjembatani kepentingan sekolah dan dunia industri. Temuan ini selaras dengan kebijakan revitalisasi SMK yang menempatkan BKK sebagai garda terdepan dalam penyaluran lulusan.

### 3. Peningkatan Kesiapan Kerja dan *Soft Skills* Siswa

Hasil pengabdian juga menunjukkan adanya peningkatan kesiapan kerja siswa, khususnya pada aspek *soft skills* dan mental kerja. Melalui pelatihan dan pendampingan guru, pembinaan siswa tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pada etos kerja, komunikasi, kedisiplinan, dan pemahaman budaya industry (Fauziah et al., 2020). Pembinaan ini dilakukan secara berjenjang sejak kelas X hingga kelas XII.

Guru berperan sebagai pendamping aktivitas siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran kontekstual, simulasi kerja, dan orientasi karier. Pendekatan ini memperkuat keyakinan siswa terhadap pilihan jalur pasca kelulusan dan mengurangi kecenderungan menganggur setelah lulus. Salah satu contoh pendampingan guru dalam pemaparan simulasi kerja dalam pengabdian ini terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4. Pendampingan Guru

Dari sudut pandang teori manajemen sumber daya manusia, peningkatan kesiapan kerja ini merupakan hasil dari proses pembinaan berkelanjutan (*continuous development*) (Siregar et al., 2025). Temuan ini memperkuat argumen bahwa *soft skills* tidak dapat dibangun secara instan, melainkan harus direncanakan dan diintegrasikan dalam sistem sekolah.

#### 4. Dampak Program terhadap Serapan Lulusan dan Keberlanjutan Kebijakan

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan zero pengangguran lulusan memberikan dampak positif terhadap peningkatan serapan lulusan SMK ATM Majalengka. Meskipun tidak seluruh lulusan langsung bekerja pada waktu yang bersamaan, seluruh lulusan telah memiliki jalur yang jelas dan terpantau oleh sekolah. Hal ini mengurangi risiko pengangguran jangka pendek dan meningkatkan akuntabilitas sekolah terhadap outcome lulusan.

Namun demikian, hasil pengabdian juga mengidentifikasi beberapa tantangan, seperti keterbatasan jumlah mitra industri, fluktuasi kebutuhan tenaga kerja, dan perbedaan kapasitas siswa. Oleh karena itu, keberlanjutan kebijakan zero pengangguran lulusan sangat bergantung pada komitmen sekolah untuk terus memperbarui kebijakan, memperluas jejaring industri, dan meningkatkan kualitas pembinaan siswa.

Secara akademik, hasil ini menunjukkan bahwa kebijakan zero pengangguran lulusan bukanlah solusi instan, melainkan sebuah proses manajerial yang menuntut konsistensi, kolaborasi, dan adaptasi berkelanjutan. Model yang dikembangkan dalam pengabdian ini dapat menjadi referensi praktis bagi SMK lain dalam mengelola lulusan secara sistematis dan berorientasi hasil.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mengembangkan konsep dan kebijakan zero pengangguran lulusan di SMK ATM Majalengka dengan produk berupa Pedoman Operasioan Zero Pengangguran. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesiapan kerja lulusan, memperkuat peran BKK, serta meningkatkan serapan lulusan oleh dunia kerja dan wirausaha dengan pembinaan siswa yang dimulai sejak kelas 10 s.d 12. Kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi model pengelolaan lulusan SMK yang berkelanjutan dan direplikasi pada sekolah lain dengan karakteristik serupa.

## REFERENSI

- Dewi, H. R. (2022). *Strategi implementasi link and match kurikulum pada program SMK pusat keunggulan* [Diploma, Universitas Negeri Malang]. <https://repository.um.ac.id/4024/>
- Fauziah, M., Zainuddin, Z., Muhajir, U., & Sopwandin, I. (2020). Implementasi Supervisi Akademik Kepala Madrasah Berbasis Pendekatan Kolaboratif Dan Kekeluargaan Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Tadbir Muwahhid*, 4(2), 117. <https://doi.org/10.30997/jtm.v4i2.2879>
- Jackson, D., Li, I., & Carroll, D. (2023). Student access to higher education through alternative pathways and differences by equity group and discipline. *Journal of Higher Education Policy and Management*, 45(6), 593–625. <https://doi.org/10.1080/1360080X.2023.2212850>
- Muharam, R. S., Afrilia, U. A., & Sudarma, S. (2025). Revitalisasi Pendidikan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri 4.0: Implikasi Kebijakan Pendidikan di Daerah Sub-Urban. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(3), 425–436. <https://doi.org/10.54259/diajar.v4i3.4440>
- Purwati, F., Ningsih, Y. Y., & Nurkolis. (2025). Mengoptimalkan Kepuasan Kerja Guru melalui Gaya Kepemimpinan yang Inovatif, Komitmen Organisasi, dan Komunikasi Efektif di Sekolah.

- Andragogi: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 5(1), 146–162.  
<https://doi.org/10.31538/adrg.v5i1.1868>
- Rico. (2025, October 29). *BPS: SMK Jadi Penyumbang Pengangguran Tertinggi*. The Indonesia Times. <https://theindonesiatimes.com/news-1189-bps-smk-jadi-penyumbang-pengangguran-tertinggi>
- Rojaki, M., Fitria, H., & Martha, A. (2021). Manajemen Kerja Sama Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 6337–6349. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.1949>
- Setiyana, A., & Oktora, S. I. (2024). Analisis horizontal mismatch pada tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 19(2), 109–124.
- Siregar, H. J., Yusuf, M., Sudaryat, R., & Siregar, N. A. (2025). PENTINGNYA PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DALAM DUNIA KERJA. *JIMPAS (Jurnal Ilmu Manajemen Pascasarjana)*, 1(1), 37–51.
- Sopwandin, I. (2023). *Manajemen Madrasah: Teori dan Strategi Pengelolaan Madrasah di Era Digital*. CV Widina Media Utama. <https://repository.penerbitwidina.com/id/publications/567035/>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat: Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas* (U. S. Hidayatun, Ed.). Yayasan Putra Adi Dharma. <https://repository.iainkediri.ac.id/1030/>